



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK 810604100950003, tempat dan tanggal lahir Tomi-Tomi, 10 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 082197779432, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Sidkelsbb+82@gmail.com sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tomi-Tomi, 27 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 082197779432, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Sidkelsbb+82@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Drh tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama bapak **La Ode Gau**, yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada bapak **La Udin Wali**, dengan saksi nikah masing-masing bernama Bapak **Hasmin Wali bin La Mune** dan Bapak **La Ode Anjas bin Bahali**, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Persiapan Tomi-Tomi, xxxamatan Waisala, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nirfan Kilian**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Eli, 20 November 2023;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga yang tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu No: 140/87/SK-D/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 23 Oktober 2024;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan
Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu,
guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan
memperoleh pengakuan hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup
membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Hakim Tunggal kiranya
dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
(PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan
pada tanggal 20 Mei 2022, di xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II
sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di
persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan pokok perkara ini dengan
membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para
Pemohon;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (Supriyanto Kelian) Nomor 140/87/SK.D/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Persiapan Tomi-Tomi xxxamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelan dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (PEMOHON 2) Nomor 140/88/SK.D/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelan dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx, xxxamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Mei 2022 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Gau yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada La Udin Wali, adapun maskawinnya berupa uang Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupia) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hasmin Wally Bin La Mune dan La Ode Anjas Bin Bahali;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan terjadi Ijab Kabul;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nirfan Kelian, umur 1 (satu) tahun
- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki 1 istri dan Pemohon II hanya memiliki 1 suami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

2. SAKSI 2, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Mei 2022 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Gau yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada La Udin Wali, adapun maskawinnya berupa uang Rp. 50.000 (Lma Puluh Ribu Rupia) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hasmin Wally Bin La Mune dan La Ode Anjas Bin Bahali;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan terjadi Ijab Kabul;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nirfan Kelian , umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki 1 istri dan Pemohon II hanya memiliki 1 suami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Drh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sejak tanggal 29 Oktober 2024 selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon pengesahan nikah / *itsbat* nikah atas pernikahan dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2022 di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU, TAHALUPU, HUAMUAL BELAKANG, , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Gau, yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada La Udin Wali, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupia) dibayar tunai, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, dan 2 orang saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum PA Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon I adalah orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum PA Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon II adalah orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, saksi 1 dan 2 telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 02 Mei 2022 di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU, TAHALUPU, HUAMUAL BELAKANG, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Gau yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada La Udin Wali, dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupia) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hasmin Wally Bin La Mune dan La Ode Anjas Bin Bahali;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nirfan Kelian, umur 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Drh



Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته
كعكسه

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Mei 2022 yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg dan Pasal 60 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, maka para Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, selanjutnya membebaskan biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Datara Hunipopu Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2022, di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. M embebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Datara Hunipopu Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami, Faisal, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Olis Tuna, S.H.I, M.H, dan Sitti Mashitah Tualeka, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapiah Tualeka, S.HI. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Olis Tuna, S.H.I., M.H
Hakim Anggota II

ttd

Sitti Mashitah Tualeka, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sapiah Tualeka, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
- Proses : Rp 0,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 0,00
- Meterai : Rp 0,00

Jumlah : Rp 0,00 (NIHIL).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 193/Pdt.P/2024/PA.Drh